



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERIKANAN

KASIAK PUTIAH NAGARI SINGGULING KEC. LUBUK ALUNG TELP/FAX (0751) 697318
KODE POS: 25581 WEBSITE: WWW.DKP.PADANGPARIAMANKAB.GO.ID

RENJA

**RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perikanan yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Perikanan Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Lubuk Alung, 17 Juli 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN



ICHAHUL NIZAM, S.Pi. MM
NIP. 19680909 199803 1 0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah,

yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis

situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

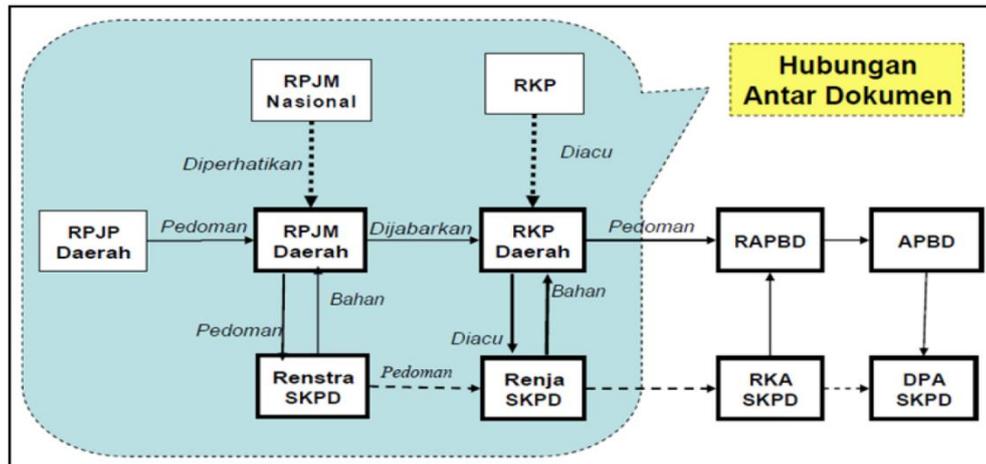
Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Perikanan merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan

sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Perikanan merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Perikanan dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Perikanan dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Perikanan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Perikanan akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Dinas Perikanan untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Perikanan diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Perikanan untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD.

Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perikanan juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Perikanan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.3 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Perikanan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3		Dokumen	11.805.000,00	11.690.000,00	99,03
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3	3		Dokumen	5.000.000,00	4.960.000,00	99,20
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12		Laporan	10.240.000,00	10.165.000,00	99,27
JUMLAH						27.045.000	26.815.000	99,15

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat sebesar Rp. 27.045.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.815.000 atau 99,15 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 2 dokumen diantaranya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.805.000,00 dengan realisasi Rp. 11.690.000,00. Atau 99,03 % Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 99,03 %, tersusun dokumen perencanaan

2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Dialokasikan anggaran untuk sub sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.960.000,00 atau 99,20 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan Dokumen DPA SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 10.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.165.000,00 atau 99,27 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyusunan laporan capaian kinerja berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	21		Orang	2.483.750.691,00	2.443.954.648,00	98,40
2)	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		Dokumen	109.260.000,00	109.030.000,00	99,79
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4		Laporan	4.990.000,00	4.070.000,00	81,56
JUMLAH						2.598.000.691	2.557.054.648	98,42

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini terdiri atas 3 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.598.000.691 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.557.054.648 atau 98,42%. Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh

indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang sangat tinggi. Selengkapnya, pencapaian kinerja dan realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada setiap Sub

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.483.750.691,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.443.954.648,00 atau 98,40 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembayaran gaji untuk 23 orang ASN selama 12 bulan dan tambahan penghasilan pegawai sebanyak 23 orang ASN selama 12 bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas sebesar Rp. 109.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 109.030.000,00 atau 99,79 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebanyak 13 orang ASN selama 12 bulan

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 4.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.070.000,00 atau 81,56 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Perikanan Tahun 2023 yang disusun sebanyak 4 laporan

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	5		paket	1.015.000,00	1.005.000,00	99,01
2)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4		laporan	1.350.000,00	852.500,00	63,15
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		Laporan	212.452.400,00	169.468.388,00	79,77
JUMLAH						220.820.400	177.320.888	80,30

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 3 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 220.820.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.320.888 atau 80,30 %. Pada pelaksanaan kegiatan ini, realisasi kinerja memenuhi telah efisien dan efektif.

- 1) Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 1.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.005.000,00 atau 99,01 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 5 paket

Singgalang, Padang Ekspres dan tabloid bulanan Trubus dengan total eksemplar sebanyak 742 eksemplar efisien dan efektifitas.

2) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 1.350.000,00 dengan realisasi Rp. 852.500,00 atau sebesar 63,15 %. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2023 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 212.452.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.468.388,00 atau 79,77%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama tahun 2023

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4		laporan	25.959.950,00	22.372.000,00	86,18
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4		Laporan	65.450.000,00	53.271.506,00	81,39
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4		Laporan	5.360.000,00	5.160.000,00	96,27
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4		laporan	412.352.240,00	407.950.000,00	98,93
JUMLAH						509.122.190	488.753.506	96,00

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 4 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 509.122.190 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 488.753.506 atau 96,00 %. Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh indikator kinerja.

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 25.959.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.

22.372.000,00 atau 86,18 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perikanan TA 2023 diantaranya penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan capaian indikator kinerja yaitu penyediaan surat keluar sebanyak 320 surat dan surat masuk sebanyak 546 surat dan penetapan SK sebanyak 58 SK

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp65.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 53.271.506,00 atau 81,39 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembelian token listrik kantor sebanyak 4 (empat) rekening yaitu Dinas Perikanan, UPTD BBI Lubuk Alung, UPTD TPI Ulakan dan TPI IV Koto Aur Malintang.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.160.000,00 atau 96,27%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan alat kantor seperti perbaikan AC sebanyak 6 unit, perbaikan printer sebanyak 3 unit dan perbaikan laptop sebanyak 3 unit

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 412.352.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 407.950.000,00 atau 98,93 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (PTT)/Swakelola sebanyak 18 orang.

3.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				908.873.000	703.956.252	77,45
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				849.750.000,00	652.271.002,00	76,76
1)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5	5	Paket	849.750.000,00	652.271.002,00	76,76

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan alokasi anggarannya Rp. 908.873.000 dan Realisasi sebesar Rp. 703.956.252 atau 77,45%

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub kegiatan Alokasi Anggaran Rp. 849.750.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 652.271.002,00 atau 76,76 % pelaksanaannya efisien dan efektifitas..

1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Dialokasikan Anggaran Rp. 849.750.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.271.002,00 atau 76,76 % pelaksanaannya efisien dan efektifitas

4.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				44.043.000,00	36.861.2z50,00	83,69
1)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	15	15	Kelompok	44.043.000,00	36.861.250,00	83,69

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini terdiri 1 Sub kegiatan dianggarkan Rp. 44.043.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 36.861.250,00 tau 83,69% pelaksanaannya efisien dan efektifitas.

1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Kegiatan ini dialokasi Anggaran Rp. 44.043.000,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 36.861.250,00 atau 99,97% pelaksanaannya efisien dan efektifitas.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				15.080.000,00	14.824.000,00	98,30
1)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	Layanan	15.080.000,00	14.824.000,00	98,30

3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dialokasikan Anggaran Rp. 15.080.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 14.824.000,00 atau 98,30 % pelaksanaannya efisien dan efektifitas

1) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Dialokasikan Anggaran Rp. 15.080.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 14.824.000,00 atau 8,30 % pelaksanaannya efisien dan efektifitas

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				2.097.999.675	1.847.030.511	88,04
1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				440.957.000	436.197.350,00	98,92
1)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25	25	Orang	440.957.000	436.197.350,00	98,92
2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.097.999.675	1.847.030.511	88,04
1)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Unit	1.102.000.000	883.522.381	80,17
2)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	Paket	555.042.675	527.310.780	95,00

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran Rp. 2.097.999.675 dan Realisasi sebesar Rp. 1.847.030.511 atau 88,04 %.

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 440.957.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 440.957.000 atau 98,92 %. Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang sangat tinggi. Selengkapnya, pencapaian kinerja dan realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

1) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 440.957.000 dengan realisasi sebesar Rp. 436.197.350,00 atau 98,92 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Temu lapang yang dilaksanakan untuk penerima bantuan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang yang berasal dari 15 kelompok.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.097.999.675 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.847.030.511 atau 88,04 %. Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang sangat tinggi. Selengkapnya, pencapaian kinerja dan realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dialokasikan Anggaran Rp. 1.102.000.000 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 883.522.381 atau 80,17 % target efisien dan efektifitas.

2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dialokasikan anggaran Rp. 555.042.675 dan realisasi sebesar Rp. 527.310.780 atau 95,00 % target efisien dan efektifitas.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				59.999.875	59.999.875	100
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				59.999.875	59.999.875	100
1)	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	35	21	Perairan umum	59.999.875	59.999.875	100

IV. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan alokasi anggaran Rp. 59.999.875 dan Realisasi program secara keseluruhan adalah Rp. 59.999.875 atau terealisasi sebesar 100% target tercapai efisien dan efektifitas.

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dialokasi alokasi anggaran Rp. 59.999.875 dan Realisasi program secara keseluruhan adalah Rp. 59.999.875 atau terealisasi sebesar 100% target tercapai efisien dan efektifitas.

1) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Dialokasi alokasi anggaran Rp. 59.999.875 dan Realisasi program secara keseluruhan adalah Rp. 59.999.875 atau terealisasi sebesar 100% target tercapai efisien dan efektifitas.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Target	Realisasi	Satuan			
V	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				23.804.040	23.804.040	100
1)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	Buku	23.804.040	23.804.040	100

V. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota di alokasi anggaran Rp. 23.804.040 dengan realisasi program secara keseluruhan adalah Rp23.804.040 atau terealisasi sebesar 100% target tercapai efisien dan efektifitas

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.804.040 dengan realisasi sebesar Rp. 23.804.040 atau 100 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Monitoring dan pembinaan mutu pada Poklhasar, monitoring dan pembinaan pelaku usaha tambak udang vaname pada lokasi tambak, pembinaan SKP temu teknis diversifikasi pengolahan hasil perikanan, pelayanan perizinan usaha perikanan dengan izin usaha perikanan yang terbit.

1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.980.000,00 atau 99.93%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Monitoring dan pembinaan mutu pada Poklamsar, monitoring dan pembinaan pelaku usaha tambak udang vaname pada lokasi tambak, pembinaan SKP temu teknis diversifikasi pengolahan hasil perikanan, pelayanan perizinan usaha perikanan dengan izin usaha perikanan yang terbit.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a.
- b.
- c.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a.
- b.
- c.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Perikanan tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Perikanan mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Perikanan. tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan

penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	AA	BB	BB	BB				
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%				
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	AA	BB	BB	BB				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah								
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Susun (Renstra, Renja)	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 01 2.01 06	Korodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (LAKIP, LPPD)	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan			-	-	88%			
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji Dan Tunjangan	30 Orang		27 Orang	23 Orang	96%			
3 25 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Dibayarkan Honorarium	25 Orang		25 orang	13 Orang	56%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Yang Disusun	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			

3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah					120%			
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	4 Paket	100%			

3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan								
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang Disediakan								

3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan				
						Jumlah Rapat yang dilakukan	12 Kali		12 kali	6 kali				
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100 %							
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor yang ditindaklanjuti	1250 Surat		1250 surat	708 surat				

3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Dibayar	4 rekening Listrik		4 Rekening listrik	4 Rekening listrik	100%			
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	10 Unit Leptop dan 6 Unit Printer							

3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non PNS yang Pendukung Administrasi Perkantoran yang Dibayarkan Jasanya	19 Orang		18 Orang	18 Orang	100%				
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 %	-							

3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang Dipelihara	29 Unit		29 unit	30 Unit					
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	20.361,29								
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	71,43%								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		8 = 7/6	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Operasional	100 %							
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Operasional	1 Unit		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	59136,57 Ton/Tahun		54.633,06	55.561,82	100%			
		Produksi Benih Ikan (Ekor/Tahun)	555.000.000 Ekor/Tahun		495.000.000	702.333.612	100%			
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	72,41%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Bimtek CPIB/CBIB yang Dilakukan	1 Kali		25 orang	25 orang	100%			
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Sertifikat CPIB/CBIB	2 Sertifikat		2 Sertifikat	1 Sertifikat				
		Jumlah Produksi Benih Ikan	558.167.634 Ekor/tahun		496.924.713	55.561,82				
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	59136,57 Ton/Tahun		54633,06	702.333.612				
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kolam BBI yang direhab	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		8 = 7/6	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Yang Dioperasional	1 Unit		1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Jumlah Induk Unggul Yang Disediakan	325 Kg		261 Kg					
		Jumlah Benih Ikan Yang Ditebar	350.000 Ekor		260.000 Ekor	306.500Ekor				
		Jumlah Pakan Ikan Yang Disediakan	14.000 Kg		45.172 Kg	28.287Kg				
		Jumlah Kolam Terpal Yang Disediakan	45 Unit		30 Unit					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	100 %							
		Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	100 %							

3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ikan yang Ditebar di Perairan Umum	70.000 ekor		65.000 Ekor	18.840 Ekor				
		Jumlah Lokasi Perikanan Tangkap Yang Diawasi Oleh Pokmaswas	50 Lokasi		25 Nagari	20 Nagari				
		Jumlah pembinaan Pokmawas	15 Kelompok		15 Kelompok	64 Kelompok				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
3 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	46,45 kg/ kapita/ tahun		44,45 kg/ kapita/ tahun	42,17 kg/ kapita/ tahun				
		Produksi Ikan Olahan	198,51 Ton/Tahun		183,41 *on/tahun	1884,24				
3 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklhasar yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	81,26 %							
	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jumlah Jenis Buku Data dan Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Disusun	2 Paket Buku		2 Paket Buku	2 Paket Buku				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Perikanan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas

Berdasarkan Perbup Nomor 65 Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang Perikanan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap;
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap;
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Dinas Perikanan. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Produksi Perikanan
 - 2. Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan
 - 3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya
 - 2. Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
 - 3. Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan
 - 4. Tingkat Konsumsi Ikan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Tingkat Produksi perikanan budidaya	Persentase Tingkat Produksi perikanan budidaya	2,05 %	2,07 %	2,12 %	2,13 %	2,08 %		2,12 %	2,13 %	
2.	Persentase Tingkat Produksi perikanan tangkap	Persentase Tingkat Produksi perikanan tangkap	1,60 %	1,62 %	1,64 %	1,66 %	1,5 %		1,64 %	1,66 %	
3.	Persentase Tingkat Produksi ikan olahan	Persentase Tingkat Produksi ikan olahan	2,00 %	2,02 %	2,04 %	2,06 %	1,70 %		2,04 %	2,06 %	
4.	Tingkat konsumsi ikan	Tingkat konsumsi ikan	44,95 Kg/kapita/Tahun	45,45 Kg/kapita/Tahun	45,95 Kg/kapita/Tahun	46,45 Kg/kapita/Tahun	44,23 Kg/kapita/Tahun		45,95 Kg/kapita/Tahun	46,45 Kg/kapita/Tahun	
	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	A	A	A	A		A	A	

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Perikanan Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatkanya Produksi Perikanan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	1,6 %	1,5 %	93,75 %	Berhasil
		Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,05%	2,08%	101,46 %	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkanya Produksi Hasil Olahan Ikan	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persen (%)	2,0 %	1,70%	85,00 %	Cukup Berhasil
3.	Meningkatkanya Pemasaran hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun	44,95	44,23	98,39	Berhasil
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	Huruf	BB	BB	BB	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
 - 2) Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan
 - 3) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya

I. Sasaran Strategis Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap (%)

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023				Interpretasi
				Satuan	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	5,6%	Persen (%)	1,6 %	1,5%	93,75 %	Cukup Berhasil

Pada tahun 2023 “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” adalah 19.380,5 ton/tahun dan “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” pada Tahun 2022 adalah 19.130,50. dengan realisasi kinerja IKU-1 Persentase Tingkat Produksi Perikanan dengan menggunakan formulasi (Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100% maka didapatkan hasilnya Kenaikan sebesar 1,5 % menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan interpretasi.



*Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 – 2023*

Produksi perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan Perairan Umum Daerah (PUD). Hasil komoditas perairan laut terdiri atas berbagai jenis ikan di antaranya adalah Ikan Kembung, Tongkol, Cakalang, Udang, kerapu, Kuwe, Bawal,

Cumi cumi, Hiu, Layaran, Pari dll. Sedangkan jenis ikan di perairan darat pada umumnya didominasi oleh Ikan Nila, Mas, Garing, Gabus, Baung, sidat, betok dll yang tersebar di lokasi perairan umum seperti sungai di 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Produksi perikanan laut tersebut dihasilkan oleh nelayan yang berada di 6 (enam) kecamatan pesisir Padang Pariaman yaitu Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan Batang Gasan. Nelayan tersebut menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana seperti pukot tepi/ pantai, payang, jaring insang tetap, jaring insang hanyut, pancing ulur rawai dan bubu. Walaupun banyaknya bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 namun produksi perikanan tangkap tidak mencapai target 1,6 % di karenakan :

1. Jumlah Hasil tangkapan ikan laut menurun dibandingkan dengan tahun lalu hal ini disebabkan karena terjadinya cuaca ekstrim seperti badai, hujan lebat dan adanya angin selatan lebih kurang selama enam bulan pada tahun 2023. Hal ini sangat mempengaruhi frekwensi kegiatan nelayan yang tinggal di pesisir kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan usaha penangkapan ikan atau aktivitas melaut.

2. Armada dan dan Alat Tangkap yang dioperasikan nelayan masih ada yang tradisional yang menggunakan kapal kapal/ perahu kecil (biduk) dengan menggunakan mesin robin yang dimodifikasi dengan jarak tempuh yang pendek sehingga hasil tangkapan ikan yang diperoleh sedikit.

3. Panjang Pantai Kabupaten Padang Pariaman 42,11 Km belum termanfaatkan secara optimal.

4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang teknik penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan kurang maksimal.

5. Biaya operasional dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan atau melaut seperti BBM tinggi bahkan sering tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan.

6. Adanya indikasi penurunan populasi ikan di wilayah 4 mil dari pantai karena diduga adanya penurunan kualitas air sebagai dampak limbah tambak udang di area 4 mil dari pantai sehingga ikan menjauh ke arah tengah. Hal ini berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di area 4 mil dengan menggunakan armada perahu dan mesin robin.

Sedangkan Faktor Pendukung diantaranya

1. Adanya distribusi bantuan armada dan alat penangkapan ikan kepada pelaku utama nelayan yang berasal dari DAK, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
2. Terjadinya modernisasi armada dan alat tangkap diantaranya peralihan dari mesin longtail ke mesin tempel 15 PK dan 40 PK sehingga menjadikan jangkauan penangkapan ikan (fishing ground) lebih jauh ke arah laut.
3. Area Jarak nelayan mencari ikan sudah bertambah jauh sebagai dampak positif dari modernisasi armada.
4. Tersedianya Rumpon sebagai tempat perkembangbiakan ikan yang berdampak terhadap peningkatan populasi ikan.

II. Sasaran Strategis Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya (%)

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023				Interpretasi
				Satuan	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	4,6%	Persen (%)	2,05 %	2,08%	101,46%	Sangat Berhasil

Pada tahun 2023, realisasi kinerja untuk IKU-2 “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” adalah 56.720,30 ton/tahun dan produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebanyak 55.561,82 ton/tahun atau Peningkatan sebesar 2,08 % dengan menggunakan formulasi perikanan (Produksi perikanan Budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan Budidaya tahun n-1) dibagi produksi perikanan Budidaya tahun n-1 kali 100% . Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dan dikategorikan “Sangat berhasil”.



*Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 – 2023*

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah sebesar 56.720,3 ton. Dimana produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat 2,08% dari tahun 2022 (55.561,82 ton). Produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat sebanyak 1.158,48 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya dengan komoditas unggulan ikan Gurami melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Dengan terbitnya KEPMEN KP tersebut, peluang Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan Kampung Gurami meningkat, sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 ini.
2. Betambahnya wawasan pelaku usaha perikanan dalam usaha budidaya ikan melalui pelaksanaan pelatihan dan pemberian pendampingan secara langsung ke pembudidaya ikan yang rutin dilakukan perbulannya.
3. Penambahan lahan budidaya dari tahun ketahun seperti tambak udang, kolam terpal, kolam fiber, Kolam Air tenang, dan kolam air deras.
4. Peningkatan Produksi budidaya ditunjang dengan beberapa kegiatan yang tersedia pada Dinas perikanan seperti bantuan sarana dan prasarana meliputi

bantuan kolam terpal, kolam fiber, budikdamber, benih ikan, dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan sehingga produksi mengalami peningkatan terutama dari produksi lele dan Nila.

5. Harga ikan air tawar mulai normal kembali dibandingkan tahun lalu yang cukup rendah seperti harga ikan gurami tahun lalu hanya dibawah Rp. 30.000,- sekarang sudah mencapai diatas Rp.30.000,-

6. Peningkatan produksi perikanan budidaya yang cukup signifikan terjadi pada produksi udang vaname sebagai dampak positif dari meningkatnya investasi tambak udang vaname di Kabupaten Padang Pariaman oleh pengusaha tambak udang dari luar daerah.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

1. Terjadinya cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi berhari-hari, suhu udara yang tinggi, perubahan cuaca yang tiba-tiba dari panas ke hujan yang berakibat terjadinya perubahan suhu air secara tiba-tiba menyebabkan ikan stres dan daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah terserang penyakit yang akan berdampak terhadap kematian ikan.

2. Tingginya harga pakan ikan menyebabkan kurangnya jumlah pemberian pakan terhadap ikan sehingga pertumbuhan ikan tidak optimal yang berdampak terhadap penurunan produksi ikan.

3. Kemampuan pembudidaya ikan dalam hal permodalan relatif rendah terutama untuk biaya pembelian pakan ikan, sementara harga jual ikan ketika panen tidak meningkat, akibatnya keuntungan yang diperoleh pembudidaya ikan rendah.

4. Adanya alih fungsi lahan dari kolam ikan ke pertanian sawah atau palawija yang berdampak terhadap penurunan produksi ikan budidaya.

5. Adanya kerusakan jaringan irigasi yang mensuplai air ke kolam-kolam budidaya ikan menyebabkan berkurangnya pasokan air ke kolam. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan di kolam.

6. Adanya dampak dari pembangunan jalan tol yang menyebabkan kekeruhan pada air kolam sehingga menurunkan daya tahan ikan dan mengakibatkan ikan tidak bernafsu makan serta rentan terhadap serangan penyakit

III. Sasaran Strategis Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan (%)

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3)
Jumlah Produksi Ikan Olahan Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023				Interpretasi
				Satuan	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Tingkat produksi hasil olahan	3,5 %	Persen (%)	2,0 %	1,7	85%	Cukup Berhasil

Pada tahun 2023, realisasi kinerja untuk IKU-3 “Jumlah Produksi Ikan Olahan” adalah 187,37 ton/tahun dan Jumlah produksi olahan tahun 2022 adalah 184,24 ton/tahun atau dengan persentase naik sebesar 1,7 % dengan menggunakan formulasi (Produksi ikan olahan tahun n dikurangi produksi ikan olahan tahun n-1) dibagi produksi ikan olahan tahun n-1 kali 100% Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan interpretasi “Cukup berhasil”

Faktor atau Hambatan produksi hasil olahan perikanan belum mencapai target 2,00 % :

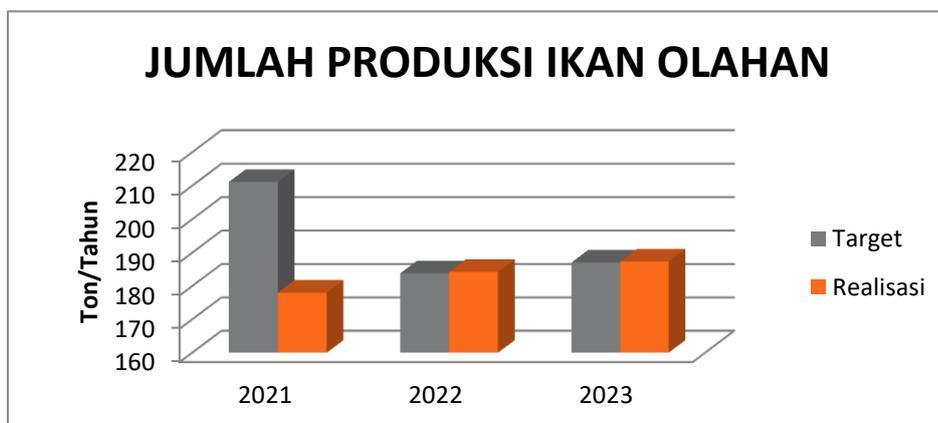
1. Kurangnya kontinuitas ketersediaan bahan baku yang akan diolah oleh kelompok pengolah hasil perikanan (Poklahsar) dan pengolah perorangan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Masih Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menggunakan alat pengolahan ikan dan penanganan produk olahan sehingga produk olahan yang dihasilkan kurang maksimal kualitasnya baik dari segi diversifikasi produk, rasa , bentuk dan kemasannya.
3. Kurangnya frekwensi pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan ikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari kurangnya anggaran.
4. Kurangnya tempat pemasaran hasil produk olahan serta kurangnya akses ke pemasaran online.
5. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan usaha pengolahan hasil perikanan masih kurang memadai, sehingga perlu upaya untuk memenuhi

kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan baik oleh pemerintah daerah maupun melalui dana CSR dari BUMN.

Sedangkan faktor pendukung nya adalah :

1. Adanya hasil tangkapan nelayan yang kurang memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan bahan baku oleh pelaku usaha pengolah ikan dalam melaksanakan pengolahan ikan dengan produk seperti ikan kering, sala ikan, rakik ikan.
2. Adanya bantuan sarana pengolahan ikan untuk pelaku usaha pengolah ikan baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
3. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolah ikan berupa bimbingan teknis diversifikasi produk olahan atau pelatihan serta pembinaan kelembagaan oleh petugas teknis maupun Penyuluh Perikanan.
4. Adanya fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan melalui temu usaha oleh BI, BRI, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
5. Adanya fasilitasi promosi produk olahan perikanan melalui pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi.

Dalam rangka peningkatan mutu hasil olahan ikan, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk meningkatkan kompetensi sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi. Di samping itu, pengawasan yang ketat oleh pemerintah sangat penting untuk mengatasi pemakaian bahan pengawet yang tidak direkomendasikan dalam pengolahan ikan.



Perkembangan Produksi Ikan Olahan Tahun 2021 – 2023

Pada umumnya, usaha pengolahan ikan dilaksanakan oleh keluarga nelayan yang usaha utamanya menangkap ikan di laut. Pengolahan ikan dilaksanakan oleh isteri nelayan ketika hasil tangkapan ikan berlebih, yaitu dengan memanfaatkan ikan hasil tangkapan sebagai bahan baku dalam pengolahan hasil perikanan dengan cara pengeringan maupun metode pengolahan lainnya. Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan istilah yang dipakai untuk tempat melakukan aktivitas pengolahan ikan. Pengolahan ikan dapat berupa penggaraman /pengeringan, pengasapan/pemanggangan dan Pengolahan Lainnya. Jumlah UPI pada tahun 2023 adalah 217 Unit UPI. Kegiatan pengolahan ikan yang paling banyak dilakukan adalah penggaraman ikan/pengeringan ikan oleh kelompok pengolah maupun usaha milik pribadi. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 830 Rumah Tangga Nelayan (RTP) di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas 830 RTP dikelola oleh kelompok dan sisanya sebanyak 14 RTP dikelola oleh pribadi. Produk olahan ikan yang dihasilkan berupa ikan kering, sala bulek, sala kepiting, sala udang, sala baledang dan rakik maco dan lain-lain

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

IV. Sasaran Strategis Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/ Kapita/Tahun)

Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Jumlah Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023				Interpretasi
				Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pemasaran Haasil Perikanan	Persentase Tingkat hasil olahan	42,82	Kg/Kapita/Tahun	44,95	44,23	98,39%	Berhasil

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan jumlah kebutuhan/ permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari instansi yang berwenang menghitung angka tersebut yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Capaian pada tahun 2023 konsumsi ikan sebesar 44,23 kg/kapita/tahun naik sebesar 2,35% dari 42,82 kg/kapita/tahun (2022) dengan predikat “berhasil”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegemaran masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam mengkonsumsi ikan masih rendah. Sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Salah satunya adalah dengan tetap meningkatkan program inovatif Dinas Perikanan yang telah dilaksanakan yaitu Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Disamping itu perlu lebih banyak melaksanakan kegiatan diverifikasi produk olahan perikanan yaitu berupa demonstrasi pengolahan ikan menjadi produk olahan seperti naget, kaki naga, dinsum, bakso ikan, rakik ikan dan lain-lain dengan sasaran Ibu-ibu PKK, kelompok Dasawisma dan orang tua murid TK



Perkembangan Realisasi Kinerja Tingkat Konsumsi Ikan

Tahun 2021-2023

Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sampai tahun 2023. didukung oleh salah satu faktor keberhasilan yaitu adanya keterlibatan Dinas Perikanan yang melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan berupa kegiatan sosialisasi gemar makan ikan (Gemarikan) baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada siswa sekolah. Namun, pada kenyataan di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan konsumsi ikan antara lain: 1) wawasan masyarakat terhadap nilai gizi dan manfaat ikan masih rendah, 2) ketertarikan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan masih rendah karena terbatasnya diversifikasi produk olahan ikan

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perikanan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	1. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	7.65	7.80	7.95	8.10	7.86				
2.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	19,186.93	19,570.66	19,962.06	20,361.29	19,420.50				
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	55,725.72	56,840.23	57,977.03	59,136.57	56,720.30				
4	Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	510,000,000	525,000,000	540,000,000	555,000,000	540,216,000.				
5	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	80	90.00	100.00	100.00	80.00				
6	Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
7	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	44.95	45.45	45.95	46.45	44.23				
8	Produksi Ikan Olahan (ton/ tahun)	187.07	190.81	194.62	198.51	187.37				
9	Cakupan bina kelompok nelayan	38.46	44.78	50.72	57.14	62.67				
10	Produksi perikanan kelompok nelayan	13,430.85	13,699.46	13,973.44	14,252.90	15,858.00				
11	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	47.19	52.94	58.37	64.00	58.91				
12	Jumlah unit pengolah ikan	195.00	196.00	197.00	198.00	217.00				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Perikanan dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan
 2. Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
 3. Tingkat Konsumsi Ikan
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas perikanan antara lain :
 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap
 2. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah
 3. Kenaikan harga pakan
 4. Masih rendahnya mutu olahan hasil perikanan
 5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengurus legalitas usaha
 6. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang masih rendah
 7. Kemandirian Pelaku Usaha Perikanan masih rendah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan

review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Dinas perikanan per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas perikanan Namun dalam proses ini Dinas perikanan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas perikanan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pengadaan Bio Flok, Bibit ikan dan pelatihan tenaga pelaksana kegiatan budidaya ikan skala keluarga	Korong pasa balai, pasa limau, kampung tengah, kampungn bonai, pasa dama, padang paru,pauah, padangntoboh, hilalang gadang			Banyaknya lahanatau lokasi lahan tidur serta krungnya tenaga terlatihuntuk bergerak di bidang ekonomi kreatif
2.	Penyediaan Bantuan Bibit Ikan	Tandikek Selatan			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas perikanan. lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas perikanan Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas perikanan adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini

memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat pengetahuan, terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama berdasarkan Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban
2.	Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Peberdayaan Masyarakat
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Eningkatkan usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Mengah serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan Terampil serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratif Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya
6	Penegakkan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal
7	Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Meningkatkan sumber-sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi melalui Penciptaan Illim yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<p>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital</p> <p>Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan</p> <p>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	<p>Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan</p> <p>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<p>Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah</p> <p>Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar</p>
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	<p>Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</p> <p>Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah</p>	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	<p>Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital</p>	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	<p>Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital</p> <p>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan

peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas perikanan Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah " Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan" dengan Indikator Tujuan " Nilai PDRB Sektor Perikanan"

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Tingkat Produksi perikanan budidaya	2,01 %	2,03 %	2,05 %	2,09%	2,12%	2,13%
			Persentase Tingkat Produksi perikanan tangkap	2,01 %	2,03 %	1,60 %	1,62%	1,64%	1,66%
		Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Produksi ikan olahan	2,01 %	2,03 %	2,00 %	2,02%	2,04%	2,06%
		Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	43,95 Kg/Kapita/Tahun	44,45 Kg/Kapita/Tahun	44,95 Kg/Kapita/Tahun	45,45 Kg/Kapita/Tahun	45,95 Kg/Kapita/Tahun	46,45 Kg/Kapita/Tahun
2.	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	A

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas perikanan mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman untuk

tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	8	9	10	11
		DINAS PERIKANAN			4.890.485.761,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.890.485.761,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.890.485.761,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti</i>	- - -	3.827.365.761,00		
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</i>	-	20.000.000,00		
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-	3.181.673.781,00		
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	27 Orang/bulan	3.071.023.781,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	109.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1.390.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	-		
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	-	132.483.000,00		
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.003.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	4 Laporan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Laporan	126.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran</i>	-	487.208.980,00		
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	200 Laporan	23.698.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	4.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	394.490.880,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik daerah Yang Berkondisi Baik</i>	-	6.000.000,00		
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Produksi Perikanan Tangkap</i>		460.000.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					

	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>	1 Unit	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	8	9	10	11
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia</i>	5 Unit		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			450.000.000,00		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					
			<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	25 Orang	450.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					

			<i>Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i>	5 Unit Usaha	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					
		<i>Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>				1 Layanan	10.000.000,00
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Produksi Benih Ikan Produksi Perikanan Budidaya</i>	525000000 Ekor/Tahun 56840,23 Ton/Tahun	2.399.041.000,00		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan</i>	54,74 Persen	250.000.000,00		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan</i>	3 Kelompok	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					

			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kelompok	250.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Produksi Benih Ikan Sertifikat CPIB/CBIB Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	526126528,6 9 Ekor 2 Sertifikat 56840,23 Ton/Tahun	60.000.000,00-		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Unit	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan</i>	1 Dokumen	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Cakupan Pembinaan Pokmaswas Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi</i>	100 Persen 90 Persen	-		
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	-		
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan Usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					
			<i>Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikanyang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	10 Pelaku Usaha	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan /atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					

			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	10 Pelaku Usaha	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	43.120.000,00		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			14.620.000,00		
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko					
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</i>	2 Dokumen	14.620000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	14.250.000,00		
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan Risiko					

			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>	15 Unit Usaha	14.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	14.250.000,00		
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Ton	14.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	J U M L A H						4.890.485.761,00

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Lubuk Alung, 17 Juli 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN


KHAIRIL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 001